



Laporan KEUANGAN AUDITED

BPSIP BANTEN

Bagian Anggaran 018.09.2900

Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2024



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
Jl. Raya Ciptayasa KM.01 Ciruas, Serang – Banten
(0254) 281055 fax (0254) 282507

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197305112006042017

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 19730611206042017

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	14
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	14
B.2. Belanja.....	15
B.3. Belanja Pegawai.....	16
B.4. Belanja Barang.....	17
B.5. Belanja Modal.....	18
B.5.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	19
C.1. Aset Lancar.....	19
C.1.1. Persediaan.....	19
C.2. Aset Tetap.....	19
C.2.1. Tanah.....	19
C.2.2. Peralatan dan Mesin.....	19
C.2.3. Gedung dan Bangunan.....	21
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	21
C.2.5. Aset Tetap Lainnya.....	21
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	21
C.3. Aset Lainnya.....	22
C.3.1. Aset Lain-lain.....	22
C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	23
C.4. Ekuitas.....	23
C.4.1. Ekuitas.....	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	24
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	24
D.2. Beban Pegawai.....	24
D.3. Beban Persediaan.....	25
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	26
D.5. Beban Pemeliharaan.....	26
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	27
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	27
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	28

E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	28
E.1.	Ekuitas Awal.....	28
E.2.	Surplus/Defisit-LO.....	29
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	29
E.3.1.	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	29
E.3.2.	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	29
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	29
E.4.1.	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL).....	29
E.4.2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	30
E.5.	Ekuitas Akhir.....	30
F.	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya.....	31
F.1.	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	31
F.2.	Pengungkapan Lain Lain.....	31

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 546.713.746 atau mencapai 296% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp184.500.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp8.102.392.324,- atau mencapai 95% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.533.668.000,-

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp28,995,044,517,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp336,897,000 Aset Tetap (neto) sebesar Rp28,649,050,109; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp9,097,408.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp28,995,044,517,-

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp387,113,000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp8,852,569,973 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp8,465,465,973. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp7,817,544,227 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp7,817,544,227,-

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp28,943,165,195 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7,817,544,227 kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7,565,646,078 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp29,726,341,871.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	184,500,000	546,713,746	296	203,573,500
Jumlah Pendapatan		184,500,000	546,713,746	296	203,573,500
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3,023,091,000	2,994,139,450	99	2,822,164,260
Belanja Barang	B.4.	5,473,077,000	5,072,252,874	93	4,141,466,758
Belanja Modal	B.5.	37,500,000	36,000,000	96	98,550,000
Jumlah Belanja		8,533,668,000	8,102,392,324	97	7,062,181,018

II. NERACA

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	336,897,000	-
Jumlah Aset Lancar		336,897,000	-
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	15,124,896,000	15,124,896,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	10,824,377,226	10,921,213,626
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	15,475,031,427	15,475,031,427
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	758,963,330	758,963,330
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	55,000,000	55,000,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	(13,857,093,483)	(13,401,863,633)
Jumlah Aset Tetap		28,381,174,500	28,933,240,750
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	31,900,000	241,224,156
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	(23,629,629)	(231,299,711)
Jumlah Aset Lainnya		8,270,371	9,924,445
Jumlah Aset		28,726,341,871	28,943,165,195
Ekuitas			
Ekuitas	C.3.1	28,726,341,871	28,943,165,195
Jumlah Ekuitas		28,726,341,871	28,943,165,195
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		28,726,341,871	28,943,165,195

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	387,113,000	196,292,200
JUMLAH PENDAPATAN		387,113,000	196,292,200
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2,994,139,450	2,822,164,260
Beban Persediaan	D.3.	36,008,600	60,725,700
Beban Barang dan Jasa	D.4.	3,420,959,822	2,709,947,448
Beban Pemeliharaan	D.5.	924,886,292	567,393,044
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	690,376,160	803,747,566
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	D.7.	196,479,325	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	589,720,324	843,662,672
JUMLAH BEBAN		8,852,569,973	7,807,640,690
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		8,465,456,973	7,611,348,490
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	6,851,000	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	666,359,146	7,281,300
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	(25,297,400)	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		647,912,746	7,281,300
SURPLUS/DEFISIT - LO		7,817,544,227	7,604,067,190

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1.	28,943,165,195	29,688,624,867
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(7,817,544,227)	(7,604,067,190)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	35,074,825	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.		
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	7,565,646,078	6,858,607,518
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-216,823,324	-745,459,672
EKUITAS AKHIR	E.6.	28,726,341,871	28,943,165,195

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembagasesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jl. Raya Ciptayasa KM 01 Ciruas – Serang, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bantenmelakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akreal (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	184,500,000	546,713,746
Jumlah Pendapatan	184,500,000	546,713,746
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,025,721,000	3,025,721,000
Belanja Lembur	188,994,000	188,994,000
Belanja Barang Operasional	1,412,145,000	1,412,145,000
Belanja Barang Non Operasional	1,212,696,000	1,212,696,000
Belanja Barang Persediaan	142,824,000	142,824,000
Belanja Jasa	485,845,000	485,845,000
Belanja Pemeliharaan	851,600,000	851,600,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	786,070,000	786,070,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	37,500,000
Jumlah Belanja	8,105,895,000	8,533,668,000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp546,713,748 atau mencapai 296.32% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp185,500,000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	184,500,000	387,517,000	210.04
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0	6,447,000	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan		89,346,410	-
Pendapatan lain-lain		63,403,336	-
Jumlah	184,500,000	546,713,746	296,32

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 168.56% dibandingkan TA 2023. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	387,517,000	89,337,700	333.77
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	6,447,000	106,954,500	-93.97
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	89,346,410	-	-
Pendapatan Lain-Lain	63,403,336	7,281,300	770.77
Jumlah	546,713,746	203,573,500	168.56

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp8,533,668,000 atau 94.95% dari anggaran belanja sebesar Rp8,533,668,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3,023,091,000	2,994,140,622	99,3
Belanja Barang	5,473,077,000	5,072,252,874	95,2
Belanja Modal	37,500,000	36,000,000	99,45
Total Belanja Kotor	8,533,668,000	8,102,392,324	96.52
Pengembalian Belanja	-	1.172	-
Total Belanja	8,533,668,000	8,102,392,324	94.95

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 20.84% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	.%
Belanja Pegawai	2,994,139,450	2,822,164,260	7.12
Belanja Barang	5,072,252,874	4,141,466,758	32.15
Belanja Modal	36,000,000	98,550,000	-61.95
Total Belanja	8,102,392,324	7,062,181,018	20.84

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,994,139,450 dan Rp2,822,164,260 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 6.09 dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya beberapa pegawai yang naik pangkat

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,834,829,622	2,748,821,795	3.13
Belanja Lembur	159,311,000	73,343,000	117.21
Jumlah Belanja Kotor	2,994,140,622	2,822,164,795	6.09
Pengembalian Belanja Pegawai	1,172	535	119.07
Jumlah Belanja	2,994,139,450	2,822,164,260	6.09

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5,072,252,874 dan Rp4,141,166,758. Realisasi belanja barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 30.70% dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dikarenakan adanya revisi anggaran pada awal tahun

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,401,230,188	1,271,719,718	10.18
Belanja Barang Non Operasional	1,597,834,808	1,070,690,962	49.23
Belanja Barang Persediaan	36,030,600	60,378,700	-40.33
Belanja Jasa	421,894,826	367,536,768	14.79
Belanja Pemeliharaan	924,886,292	567,393,044	63.01
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	690,376,160	803,747,566	-14.11
Jumlah Belanja Kotor	5,072,252,874	4,141,466,758	22.47
Pengembalian Belanja Barang		0.00	0
Jumlah Belanja	5,072,252,874	4,141,466,758	22.47

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp36.000.000 dan Rp98,100,000 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada

TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 8.81% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000	98,100,000	-63.30
Jumlah Belanja Kotor	36.000.000	98,100,000	-63.30
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	36.000.000	98,100,000	-63.30

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp36.000.000 dan Rp98,100,000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 mengalami penurunan sebesar 63.30% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Ada anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000	98,100,000	-63.30
Jumlah Belanja Kotor	36.000.000	98,100,000	-63.30
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	36.000.000	98,100,000	-63.30

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp336,897,000 dan Rp0,00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	828,000	0
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	327.969.000	0
Persediaan Lainnya	8,100,000	0
Jumlah	336,897,000	0

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15,124,896,000.00 dan Rp15,124,896,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10,824,377,226 dan Rp10,921,213,626. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10,921,213,626
Mutasi Tambah	
Pembelian	36,000,000
Mutasi Kurang	
Penghapusan Aset	-132,836,400

Saldo per 31 Desember 2024	10,824,377,226
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-10,573,034,354
Nilai Buku per 31 Desember 2024	251,342,872

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

- Mutasi penambahan berupa pembelian AC dari kegiatan PNBPN
- Mutasi Kurang berupa penghapusan aset berupa :

No	Nama Barang	Nilai
1	Notebook	65,259,900
2	UPS	9,900,000
3	Jet Pump	18,700,000
4	Finger Printer Time	12,100,000
5	Alat perontok mesin	11,880,000
6	AC	1,560,000
7	Rak Kayu	850,000
8	Filling Cabinet Besi	7,800,000
9	Pallet	786,500
10	Meja kerja kayu	4,000,000
	Jumlah	132,835,400

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15475,031,427 dan Rp15,475,031,427 Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	15,475,031,427
Mutasi Tambah	
-	0.00
Saldo per 31 Desember 2024	15,475,031,427
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	2,738,643,546
Nilai Buku per 31 Desember 2024	12,736,387,881

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.758,963,330 dan Rp758,963,330.00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	758,963,330
Mutasi Tambah	0.00
Saldo per 31 Desember 2024	758,963,330
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	340,834,861
Nilai Buku per 31 Desember 2024	418,128,469

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp55,000,000. dan Rp55,000,000.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-13,589,217,874 dan Rp.-13,401,863,633,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	10,824,377,226	-10,509,739,467	157,890,427.00
2.	Gedung dan Bangunan	15,475,031,427	-2,738,643,546	12,932,090,129.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	758,963,330	-340,834,861	429,986,329.00
4.	Aset Tetap Lainnya	55,000,000		55,000,000.00
Akumulasi Penyusutan			-13,589,217,874	13,524,154,109

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31,900,000 dan Rp241,224,156. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	241,224,156
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	132,836,400
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-342,160,556
Saldo per 31 Desember 2024	31,900,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-23,629,629
Nilai Buku per 31 Desember 2024	8,270,371

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-23,629,629 dan Rp-231,299,711,-

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	31,900,000	-23,629,629	8,270,371
Akumulasi Penyusutan		31,900,000	-22,629,629	8,270,371

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp28,726,341,871 dan Rp28,943,165,165. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp387,113,000 dan Rp196,292,200 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budaya	373,666,000	106,954,500	249.37
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,000,000	7,425,000	-5.72
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	0	81,912,700	-100.00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	7,425,000	-100.00
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	6,447,000	0	249.37
Jumlah	387,113,000	196,292,200	97,21

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2,994,139,450 dan Rp2,822,164,260 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,008,090,000	2,375,503,800.00	-15.47
Beban Pembulatan Gaji PNS	31,567	39,764.00	-20.61

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Anak PNS	49,783,168	51,644,888.00	-3.60
Beban Tunj. Beras PNS	113,699,400	144,333,060.00	-21.22
Beban Tunj. Fungsional PNS	223,780,000	496,410,000.00	-54.92
Beban Tunj. PPh PNS	21,957,705	25,218,554.00	-12.93
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	25,200,000.00	0.00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	133,666,610	169,828,960.00	-21.29
Beban Tunjangan Umum PNS	33,250,000	32,240,000.00	3.13
Beban Uang Lembur	159,311,000	132,439,000.00	20.29
Beban Uang Makan PNS	225,370,000	320,403,000.00	-29.66
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		-446	-100.00
Jumlah	2.994,139	2,822,164,260	6.09

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp36,008,600 dan Rp60,725,700. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	35,202,600	60,725,700	-42.03
Beban Persediaan Lainnya	806,000	0	
Jumlah	36,008,600	60,725,700	-40.70

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3,420,959,822 dan Rp2,709,947,448. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1,241,434,036	967,796,837	28.27
Beban Penamah Daya Tahan Tubuh	-	24,732,405	-100.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	360,660,772	102,894,125	250.52
Beban Barang Operasional Lainnya	136,450,000	70,000,000	#DIV/0!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	66,012,000	105,640,000	94.93
Beban Sewa	78,325,000	8,000,000	-37.51
Beban Jasa Lainnya	58,290,000	-	879.06
Beban Jasa Konsultan	-	31,375,000	-
Beban Jasa Profesi	44,200,000	99,235,750	-100.00
Beban Keperluan Perkantoran	1,194,508,188	1,071,347,313	-55.46
Beban Langganan Listrik	237,161,205	224,908,986	11.50
Beban Langganan Telepon	3,918,621	4,017,032	5.45
Jumlah	3,420,959,822	2,709,947,448	26.24

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp924,886,292 dan Rp567,393,044 Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	573,813,525	297,856,470	92.65
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351,072,767	-	-
Jumlah	924,886,292	567,393,044	63.01

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp690,376,160 dan Rp.803,747,566. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	500,806,160	488,317,566	2.56
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	189,570,000	179,010,000	5.90
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	136,420,000	-100.00
Jumlah	690,376,160	803,747,566	-14.11

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp196,479,325 dan Rp.0-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	196,479,325	0	0
Jumlah	196,479,325	0	0

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp589,720,324 dan Rp843,662,672. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	391,404,496	391,404,496	-50.00
Beban Penyusutan Irigasi	10,4396,056	10,436,056	-50.00
Beban Penyusutan Jaringan	10,300,278	13,393,953	-50.43
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,654,074	4,772,824	-82.67
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	175,925,420	423,655,343	-73.41
Jumlah	589,720,324	843,662,672	-61.95

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	641,061,746	7,281,300	8,704.22
Jumlah	641,061,746	7,281,300	8,704.22

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp28,943,165,195 dan Rp29,688,624,867.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp-7,817,544,227 dan Rp-7,604,067,190 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35,074,825 dan Rp0.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35,074,825 dan Rp0.00.

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,565,646,078 dan Rp.6,858,607,518 Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau

lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2024
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,102,392,324
Diterima dari Entitas Lain	-546,713,746
Transfer Masuk	9,967,500
Jumlah	7,565,646,078

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp28,995,044,517 dan Rp28,943,165,195.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Tidak ada penjelasan mengenai hal-hal penting lainnya